

Analisa yuridis terhadap terorisme sebagai dasar negara untuk melakukan derogasi dari konvensi-konvensi HAM internasional dalam keadaan darurat = A juridical analysis on terrorism as a basis to derogate from international human rights conventions in states of emergencies

Raoul Aldy Muskitta, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20431691&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang penggunaan kejadian-kejadian terorisme sebagai dasar untuk melakukan derogasi dari konvensi-konvensi HAM internasional, khususnya International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan European Convention on Human Rights (ECHR). Pertanyaan dasar yang menjadi pusat penelitian skripsi ini bagaimana keadaan dari kejadian terorisme yang bersangkutan sehingga dapat dianggap sebagai keadaan darurat yang sesuai dengan atau syarat ?public emergency threatening the life of the nation? dan bagaimana tindakan seperti apakah yang dapat diambil oleh negara yang melakukan derogasi sehingga sesuai dengan syarat ?strictly required by the exigencies of the situation? atau syarat proporsionalitas yang ada dalam klausul derogasi dalam ICCPR dan ICCPR. Dalam satu sisi, kedaulatan setiap negara dalam hubungan internasional harus dihormati. Hal ini juga kepentingan negara untuk melindungi keamanan nasionalnya, sehingga negara dapat menentukan kapan ada satunya keadaan darurat dan tindakan seperti apa yang diperlukan untuk menghadapi keadaan darurat yang bersangkutan. Ini dikarenakan negara dianggap lebih tahu akan kondisi keamanan nasionalnya daripada siapapun. Di sisi lain, praktik negara-negara menunjukkan bahwa banyak negara yang secara sewenang-wenang melanggar HAM warga negaranya yang oleh ICCPR dan ECHR bersifat non-derogable atau tidak dapat dilanggar dalam kondisi apapun termasuk keadaan darurat. Dengan demikian skripsi ini membahas persinggungan antara dua kepentingan yaitu kepentingan melindungi keamanan nasional dan kepentingan untuk melindungi HAM.

ABSTRACT

This study explains the usage of terrorism incidents as basis to derogate from international human rights conventions, namely the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and European Convention on Human Rights (ECHR). The central question of this study is how must the gravity of terrorism attack be in order for it to amount to a ?public emergency threatening the life of the nation? and what measures taken by a state would be in accordance with the requirement of ?strictly required by the exigencies of the situation? or proportionality requirement, as required by the ICCPR and ECHR. On one hand, every state?s sovereignty must be respected in

international relations. This includes respecting a state's need in protecting its national security, thereby allowing the state to determine the necessary measures in dealing with a state of emergency. This is because a state is considered to be more knowledgeable of the state of its national security than anyone else. On the other hand, state practice demonstrates that many states tend to abuse the human rights of its citizens that are deemed non-derogable by the ICCPR and ECHR even in states of emergencies. Therefore, this study seeks to discuss the clash between two competing interests, namely the protection of a state's national security and protection of the human rights of individuals.